

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya otonomi daerah serta reformasi keuangan telah merubah iklim pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi mulai diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan, BPK mengaudit, dan menyampaikannya kepada DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi masyarakat secara luas. Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan Pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya secara luas.

Perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Proses digitalisasi terjadi disemua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan konvensional (Bonson&Escobar, 2005).

Teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan lebih mengacu kepada penggunaan teknologi seperti internet. Telah banyak lembaga yang

pemerintahan yang memanfaatkan teknologi internet. Lebih dari 19% dari seluruh organisasi pemerintahan di seluruh dunia telah mengadopsi *E-government* dengan tingkatan yang berbeda (West, 2005). Perkembangan *E-government* di Pemda bertujuan untuk meningkatkan hubungan informasi dan pelayanan yang efektif dan efisien, tidak hanya antar lembaga pemerintah tetapi juga dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Bahkan di beberapa negara *E-government* dianggap sebagai salah satu kebijakan publik untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi sarana yang memungkinkan komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah yang efektif dan efisien dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya informasi di *website* Pemda.

Penggunaan *website* Pemda sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah dalam hal kinerja serta karakteristiknya kepada publik. Hampir semua Pemda di Indonesia memiliki *website* dengan kualitas dan peranan yang berbeda. Berbagai informasi disajikan dalam *website* Pemda, ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah, tidak banyak juga yang memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Peran pemerintah dalam penyedia layanan publik serta pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi sangat besar akibat adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya sistem pengawasan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur pencapaian kemajuan Pemda.

Informasi merupakan hal yang sangat penting yang mencerminkan pengetahuan teknis. Pengukuran kinerja pegawai dalam pemerintah daerah

harus memiliki kemampuan teknis tentang bagaimana melakukan dan mengimplementasikan pengukuran kinerja. Perkembangan reformasi sektor publik yang dinamis ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat yang menilai secara kritis baik buruknya kinerja pemerintah dalam menjalankan maupun mengelola sumber-sumber daya publik. Pemikiran masyarakat yang kritis menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang bisa diwujudkan dengan peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan *website* Pemda.

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara tersirat mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Media elektronik merujuk kepada *website* milik Pemda yang dimanfaatkan Pemda untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Pemendagri No. 7A Tahun 2007).

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi didukung oleh pemerintahan dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintahan jika didesain dengan sistem yang efektif. Selain itu pengukuran kinerja pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor lain diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pembangunan (Fitriyanti&Partolo, 2009). Faktor

yang lain dan perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi seperti akses internet (*cyber*) sebagai salah satu sarana informasi global dimana dunia internet dapat dikatakan sebagai ensiklopedi dunia yang merupakan pusat dari segala informasi seluruh dunia yang efektif dan efisien. Pengaksesan internet yang saat ini mudah dilakukan dan mampu menjangkau seluruh dunia membuat pemanfaatan situs-situs bagi pemerintah daerah akan lebih mendunia dimana pemerintah daerah dapat memaparkan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, memberikan pelayanan yang mudah dan efisien kepada masyarakat serta melaporkan kinerja dan karakteristik pemerintah daerah kepada masyarakat.

Penelitian ini direplikasi dari Rora Puspita dan Dwi Martani (2012), perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang hanya dikhususkan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah yang telah memiliki *website* resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam *website* Pemda, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses *website* tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kinerja dan karakteristik Pemda yang di dalamnya termasuk kompleksitas dan belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Informasi Dalam Website Pemda (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup dari pembahasan yang dilakukan peneliti meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kinerja Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi dalam *website* Pemda di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi dalam *website* Pemda di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh kinerja dan karakteristik Pemerintah Daerah terhadap informasi dalam *website* Pemda di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kinerja dan karakteristik Pemerintah daerah terhadap kualitas informasi dalam *website* Pemda pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah guna meningkatkan pelayanan publik dalam transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk pencapaian tujuan bersama.

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi dalam *website* Pemda di Jawa Tengah.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi dalam *website* Pemda di Jawa Tengah.

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja dan karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi dalam *website* Pemda di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia.

1. Pihak Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja dan karakteristik pemda melalui *website* agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

2. Pihak Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja dan karakteristik pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

3. Pihak Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai sektor publik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, penelitian terdahulu, model penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian; populasi, sampel, dan teknik sampling; data dan sumber data; teknik pengumpulan data; variabel penelitian dan pengukuran; dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.